

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLA HUTAN DESA DI SEKITAR GUNUNG RAJABASA LAMPUNG

Rommy Qurniati¹, Duryat¹, Hari Kaskoyo¹

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Jl Soemantri Brojonegoro No 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

rommy.qurniati@gmail.com

Abstract

Management of forest area could not be separated from the communities who are living surrounding and their depending on the forest area and its products. As a manifestation of social responsibility, Lampung University has been conducting a program of KKN-PPM in order to increase the community welfare at once keep maintaining the forest function. The activity intended to increase capacity of Forest Village Administrator Agency (LPHD) and village officials in terms of institutional ability administration and group dynamics. A method of lecture and discussion, followed by practice demonstration and 40 days accompaniment were employed as training method. The result showed that the training has proven to be very effective in improving the ability of participants cognitively, affectively and psychometrically in terms of administrative definition, types of administrative tools, characteristics and functions of group dynamics, communication, leadership and groups synergies, as well as factors influence the quality of relationships within a group. Therefore, the efforts to strengthened LPHD should be implemented continuously to create a dynamic group where the members were actively involved, responsible and skilled to work in the group. This training was also very effective to be a means of capacity building of the community and students.

Keywords: forest village, Forest Village Administrator Agency, institution straighten

Abstrak

Pengelolaan wilayah hutan, tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari kawasan dan hasil hutan. Sebagai wujud dari tanggungjawab sosial perguruan tinggi, Universitas Lampung dengan program KKN-PPM melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus LPHD dan aparat desa dalam hal kemampuan administrasi kelembagaan dan dinamika kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi, diikuti dengan demonstrasi praktek, dan kemudian pendampingan masyarakat selama 40 hari. Kegiatan ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik dalam hal pengertian administrasi, jenis-jenis perangkat administrasi, ciri-ciri dan fungsi dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan dan sinergi dalam kelompok, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan di dalam suatu kelompok. Oleh karena itu upaya penguatan kelembagaan LPHD perlu terus digalakkan agar terwujud lembaga yang dinamis dengan anggota yang terlibat aktif, bertanggungjawab dan terampil dalam bekerjasama. Kegiatan pelatihan ini juga sangat efektif menjadi sarana belajar bersama bagi peningkatan kapasitas masyarakat dan mahasiswa.

Kata kunci: hutan desa, LPHD, penguatan kelembagaan

Pendahuluan

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang telah memberikan penekanan pada “*Community Based Development*” yaitu pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rajabasa merupakan lembaga pengelola hutan tingkat tapak yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan wilayah hutan di Register 3 Gunung Rajabasa dengan luasan \pm 5160 Ha. Pengelolaan wilayah hutan, tak lepas dari masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan. Salah satu program KPHL Rajabasa yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 2014-2023 adalah Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam skema hutan desa.

Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Permenhut No. 89 Tahun 2014). Melalui skema hutan desa, dibentuk kelompok atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dengan tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan hutan yang dikelolanya.

Dalam pengembangan hutan desa, peran pemangku kepentingan dalam bentuk kelembagaan sangat penting terutama sebagai media penyebaran inovasi (Budi 2009). Kelembagaan adalah suatu system organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya dan sekaligus mengatur hubungannya (Nasution 2002). Lebih lanjut Suharti dkk (2016) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam hal ini perlu ada penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan, karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat sehingga benar-benar mempercepat difusi dan adaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam pengembangan hutan. Dengan demikian penataan sistem kelembagaan dengan tepat akan memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat.

LPHD yang telah terbentuk sejak tahun 2014 masih minim kegiatan. Penyuluhan dan pelatihan yang terkait dengan kelembagaan juga belum pernah dilakukan. Oleh karena itu upaya mengoptimalkan kelembagaan LPHD perlu diupayakan sebagai salah satu alternatif

agar terjadi kelestarian hutan. Sehingga sangat penting untuk dilakukan penyuluhan penguatan kelembagaan kelompok LPHD agar pengelolaan hutan desa dapat dilakukan secara terorganisir sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan selama 40 hari yaitu sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 di 3 desa yang berbatasan dengan wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan- Lindung (KPH-L) Rajabasa yang sejak Juli 2017 berganti nama menjadi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) XIII Gunung Rajabasa-Way Pisang dan Bukit Serampok. Desa yang menjadi wilayah pengabdian adalah Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda, Desa Way Kalam dan Padan Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga desa ini dipilih karena merupakan desa binaan KPH XIII Gunung Rajabasa-Way Pisang dan Bukit Serampok yang sedang mengajukan ijin Hutan Desa.

Masyarakat sasaran dalam pengabdian ini adalah pengurus dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). LPHD adalah organisasi di tingkat desa yang merupakan kumpulan petani pengelola lahan hutan di wilayah KPH XIII Gunung Rajabasa-Way Pisang dan Bukit Serampok. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program

kerja Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Lampung (Unila) yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan melibatkan 25 orang mahasiswa KKN-PPM yang berasal dari berbagai jurusan di Unila. Pada pelaksanaannya, program kerja KKN-PPM dilaksanakan bekerjasama dengan LPHD masing-masing desa, KPH dan tim program KKN-PPM. KPH sebagai mitra kegiatan KKN-PPM menjadi pendamping lapang mahasiswa KKN yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pemberdayaan masyarakat.

Penguatan kelembagaan LPHD Desa Sumur Kumbang, Padan dan Way Kalam dilakukan dengan metode penyuluhan, pembinaan dan pendampingan. Penyuluhan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017 pada pukul 09.00-12.00 WIB di Desa Padan, pukul 14.00-17.00 WIB di Desa Way Kalam dan pukul 19.00-22.00 WIB di Desa Sumur Kumbang. Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan ada 3 yaitu dinamika kelompok, penguatan kelembagaan dan administrasi kelompok. Sedangkan pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terus-menerus selama 40 hari. Mahasiswa KKN-PPM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan LPHD.

Evaluasi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan membandingkan hasil pre test dan post tes. Sedangkan pembinaan dan pendampingan di evaluasi secara berkala setiap minggu untuk mengevaluasi proses yang telah dilakukan dan perbaikan rencana pelaksanaan jika dibutuhkan. Ukuran keberhasilan pembinaan dan pendampingan diukur dari perubahan intensitas pertemuan kelompok, administrasi kelompok, dan partisipasi anggota kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Kartasasmita, 1997; Sulistyani, 2004; Andriyani dkk., 2017). Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar yang berperan sebagai pendamping masyarakat (Graha, 2009).

Kelemahan Organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) adalah kelembagaan yang belum terorganisasi dengan baik serta lemahnya administrasi. Untuk itu pelatihan tentang penguatan kelembagaan LPHD dilaksanakan. Program ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan KKN –PPM

Universitas Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksanaan program kerja diawali dengan sosialisasi kegiatan KKN-PPM ke masyarakat Desa Sumur Kumbang, Way Kalam dan Padan pada minggu pertama. Selain sosialisasi, mahasiswa KKN-PPM juga melakukan pendekatan sosial dan identifikasi karakteristik masyarakat khususnya pada pengurus dan anggota LPHD. Diharapkan setelah terjalin kedekatan sosial antara mahasiswa KKN-PPM dengan masyarakat maka akan mendorong partisipasi dan kepedulian masyarakat pada semua program KKN-PPM.

Setelah dilakukan pendekatan sosial pada minggu pertama, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan dan pelatihan tentang penguatan kelembagaan, dinamika kelompok dan administrasi kelompok. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Padan, aparat desa, pengurus LPHD dan perwakilan anggota LPHD, dan staf dari KPH XIII. Ketua KPH XIII, Wahyudi, S.Hut., hadir di Desa Way Kalam namun di 2 desa lainnya diwakilkan pada staf-staf KPH XIII.

Materi tentang administrasi kelompok yang disampaikan antara lain yaitu pengertian administrasi, jenis-jenis perangkat administrasi, dan perangkat kelengkapan administrasi lainnya. Sedangkan pada materi tentang dinamika kelompok dijelaskan bahwa dinamika merupakan tingkah laku anggota

satu dengan lainnya langsung saling mempengaruhi secara timbal balik. Atau proses berlangsungnya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain, anggota dengan anggota keseluruhan. Keadaan ini akan terjadi selama semangat kelompok terus menerus ada. Kelompok tersebut selalu bersifat dinamis dimana setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Penyuluhan dinamika kelompok ini dirasa penting mengingat kelompok adalah terdiri dari beberapa individu yang mempunyai hubungan psikologis secara timbal balik dan nampak jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

Kegiatan ini sangat menarik minat masyarakat karena diikuti hampir seluruh pengurus LPHD dan aparat desa. Proses pelatihan berjalan dengan lancar dan tertib. Hal yang menarik adalah pelatihan ini sangat interaktif. Hampir seluruh peserta pernah mengalami sulitnya mengelola kelompok dan menghadapi berbagai kendala dalam administrasi kelompok, maka sepanjang pelatihan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

Berdasarkan hasil diskusi diperoleh informasi bahwa saat ini pertemuan kelompok sudah jarang dilakukan oleh LPHD, masyarakat mulai bosan untuk mengadakan pertemuan karena ijin Hutan Desa yang belum terbit

sejak 4 tahun yang lalu diusulkan. Selain itu administrasi LPHD sangat minim dan belum ada data tentang jumlah dan jenis tanaman serta potensinya. Ini disebabkan karena masyarakat belum mengenal bagaimana administrasi yang baik dan pentingnya data base tanaman dan area kerja anggota LPHD.

Pelatihan ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan kognitif masyarakat terkait administrasi kelompok dan dinamika kelompok. Sebelum mendapatkan pelatihan ini, hanya 34% masyarakat yang mengetahui pengertian administrasi, 49% mengetahui jenis-jenis perangkat administrasi, dan 40% mengetahui perangkat kelengkapan administrasi. Setelah mengikuti pelatihan, 87% masyarakat telah mengetahui pengertian administrasi, 88% mengetahui jenis-jenis perangkat administrasi, dan 80% mengetahui perangkat kelengkapan administrasi. Sebelum pelatihan dilaksanakan, hanya 24% masyarakat yang mengetahui ciri-ciri dan fungsi dinamika kelompok, 27% mengetahui komunikasi, kepemimpinan dan sinergi dalam kelompok, dan 27% mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan di dalam suatu kelompok. Setelah mendapatkan pelatihan, 84% masyarakat telah mengetahui ciri-ciri dan fungsi dinamika kelompok, 80% mengetahui komunikasi, kepemimpinan dan sinergi dalam kelompok, dan 80%

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan di dalam suatu kelompok.

Setelah kegiatan pelatihan, para pengurus diuji untuk secara mandiri melaksanakan administrasi kelompok. Hasilnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari segi psikomotorik dan keterampilan pengurus kelompok. Setelah kegiatan pelatihan berakhir, 3 orang mahasiswa penanggungjawab kegiatan penguatan kelembagaan kelompok yang masing-masing bertanggungjawab atas 1 LPHD menindaklanjuti pelatihan tersebut, guna mencapai penguatan kelembagaan dan peningkatan administrasi kelompok.

Mahasiswa KKN-PPM melakukan pendampingan kepada pengurus LPHD dengan menghidupkan pertemuan kelompok dan menata kembali administrasi kelompok seperti pembuatan administrasi yang belum dibuat seperti buku agenda, buku inventaris, surat masuk dan surat keluar, buku induk anggota, dan lain-lain. Selain itu pendataan tanaman juga mulai dilakukan oleh pengurus LPHD bersama mahasiswa KKN-PPM. Untuk mendukung administrasi kelompok, tim KKN-PPM memberikan bantuan seperangkat alat tulis untuk masing-masing LPHD.

Hingga kegiatan ini berakhir, kondisi kelembagaan masyarakat dan administrasinya mengalami kemajuan yang signifikan.

Berdasarkan hal ini pengurus LPHD optimis bahwa tahun depan izin pengelolaan hutan desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diperoleh dengan bermodalkan kelembagaan yang unggul didukung system administrasi yang handal.

Kesimpulan

Kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan bagi Pengelola Hutan Desa di Sekitar Hutan Lindung gunung Rajabasa, secara signifikan telah meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mahasiswa KKN-PPM sangat efektif untuk menjadi sarana belajar bersama bagi peningkatan kapasitas masyarakat dan mahasiswa. Upaya penguatan kelembagaan LPHD perlu terus digalakkan agar terwujud lembaga yang dinamis dengan anggota yang terlibat aktif, bertanggungjawab dan terampil dalam bekerjasama mengembangkan hutan desa dan bersama meningkatkan kesejahteraan anggota.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) yang telah memberikan dana KKN-PPM tahun 2016 pelaksanaan tahun 2017 dan Universitas Lampung serta mahasiswa KKN-PPM

Universitas Lampung yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Andriyani, A.A.I., Martono, E. dan Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*. 23(1): 1-16.
- Budi, L.S., Maa'rif M.S., Sailah I. dan Raharja S. 2009. Strategi Pemilihan Model Kelembagaan dan Kelayakan Finansial Agroindustri Wijen. *J.Tek. Ind. Pert.* 19 (2): 56-63.
- Graha, A.N. 2009. Pengembangan Masyarakat Pembangunan melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*. 5(2):117-126.
- Kartasmita, G. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nasution M. 2002. Meningkatkan Mutu Pengelolaan Hutan melalui Reaktualisasi Kearifan Masyarakat Hukum Adat dalam Memberdayakan Masyarakat. Lembaga Pengembangan Lingkungan dan Sumberdaya Manusia Kerjasama dengan Uni Eropa. Balikpapan.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., dan Sundawati, L. 2016. Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2016: 165-175.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta